

RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL DI KOTA SEMARANG: ANTARA INOVASI PENDIDIKAN DAN KONTROVERSI KESETARAAN, 2006-2013

Nanda Pangastika¹, Dhanang Respati Puguh², Singgih Tri Sulistiyono³

^{1,2,3}Universitas Diponegoro

nandatika03@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas dinamika program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Kota Semarang selama periode 2006-2013, dengan fokus pada dua perspektif utama: inovasi pendidikan dan kontroversi terkait kesetaraan akses. RSBI diperkenalkan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui adopsi kurikulum bertaraf internasional dan penggunaan Bahasa Inggris sebagai pengantar dalam pembelajaran. Namun, implementasi program ini di Kota Semarang memunculkan berbagai tantangan, seperti persoalan eksklusivitas ketimpangan akses pendidikan, dan pembiayaan yang memberatkan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahapan utama yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun RSBI memberikan sejumlah inovasi dalam metode pengajaran dan fasilitas pendidikan, program ini juga memperbesar kesenjangan sosial antara peserta didik. Kebijakan ini dinilai cenderung mengistimewakan siswa dari keluarga mampu secara ekonomi, sehingga bertentangan dengan prinsip pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Dalam Putusan No.5/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi menegaskan program RSBI bertentangan dengan prinsip pendidikan demokratis, artikel ini merefleksikan perjalanan program tersebut sebagai pelajaran penting bagi kebijakan pendidikan di Indonesia. Fenomena RSBI menunjukkan perlunya keseimbangan antara inovasi dengan prinsip keadilan sosial, agar kebijakan pendidikan dapat benar-benar menyentuh semua lapisan masyarakat.

Kata Kunci: RSBI, Inovasi Pendidikan, Kesetaraan, Kota Semarang, Kebijakan Pendidikan.

ABSTRACT

This article discusses the dynamics of the International Standard School Pilot Programme (RSBI) in Semarang City during the period 2006-2013, focusing on two main perspectives: educational innovation and controversies related to equal access. RSBI was introduced as a government effort to improve the quality of education through the adoption of an international standard curriculum and the use of English as the medium of instruction. However, the implementation of this programme in Semarang City gave rise to various challenges, such as issues of exclusivity, inequality of access to education, and financing that was burdensome for the community. This study uses a historical method

that includes four main stages, namely heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results show that although RSBI provided a number of innovations in teaching methods and educational facilities, this programme also widened the social gap between students. This policy is considered to favour students from economically privileged families, thereby contradicting the principles of inclusive and equitable education. In Decision No. 5/PUU-X/2012, the Constitutional Court affirmed that the RSBI programme contradicts the principles of democratic education. This article reflects on the journey of this programme as an important lesson for education policy in Indonesia. The RSBI phenomenon demonstrates the need for a balance between innovation and the principle of social justice, so that education policy can truly reach all levels of society.

Keywords: *RSBI, Education Innovation, Equity, Semarang City, Education Policy.*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bagian vital dari tubuh kemajuan suatu bangsa. Indonesia salah satu negara yang mempunyai fungsi pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Alinea IV Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini diuraikan dalam pasal 50 ayat 3 yang menyebutkan bahwa “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melaksanakan sekurang-kurangnya satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional”. Di antara banyak kebijakan dalam dunia pendidikan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) merupakan salah satu perwujudan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. RSBI mengimplementasikan standar internasional dalam proses pembelajaran di sekolah. Kebijakan ini merupakan perwujudan dari penempatan pendidikan sebagai sebuah sistem yang harus mengikuti perkembangan masyarakat artinya pendidikan menjadi objek dari perubahan sosial.

Sejak tahun 2006, penyelenggaraan satuan pendidikan yang diarahkan menuju standar internasional diwujudkan melalui pendirian RSBI. RSBI merupakan sekolah yang

telah mencapai Sekolah Standar Nasional (SSN). RSBI dirancang untuk mencetak generasi yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan akademik, tetapi juga memiliki kemampuan bahasa dan keterampilan yang sesuai dengan standar internasional. Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, menjadi salah satu kota yang turut menerapkan program RSBI di beberapa sekolah, baik di tingkat dasar maupun menengah. Secara konsep, RSBI dianggap sekolah yang ideal karena bisa “mengglocal dan bergengsi”. Sekolah ini dipersiapkan secara khusus untuk mewakili dalam beberapa pertanyaan akan tingginya kualitas pendidikan yang ada di negeri ini, sebab sekolah RSBI ini dituntut memiliki beberapa persyaratan yang terbilang tidak mudah. Di samping harus menuntaskan kurikulum nasional, RSBI juga memiliki kewajiban ditambahkan kurikulum Internasional seperti Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, penggunaan fasilitas belajar berbasis teknologi informasi, kelengkapan sarana dan prasarana seperti ruanga ber-AC. Keberadaan RSBI merupakan respons dari kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah berkualitas guna mempersiapkan generasi masa depan yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, inovatif, dan demokratis sejalan dengan percepatan perubahan sosial sebagai bagian dari rekayasa era global, oleh karena itu diperlukan sikap optimisme dan tanggung jawab yang tinggi sebab mengelola sekolah merupakan institusi paling kompleks di antara institusi sosial yang ada.

Tahun 2012 perkembangan program RSBI menimbulkan polemik di kalangan masyarakat hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan RSBI memunculkan sejumlah persoalan antara lain *pertama* biaya RSBI yang mahal. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) dana sumbangan pembangunan yang harus dibayar di RSBI tingkat SD dan SMP rata-rata mencapai Rp 6.000.000,00, sedangkan tingkat SMA sebesar Rp 15.000.000,00, sehingga meskipun ada siswa yang potensial dan pintar namun tidak memiliki biaya oleh karena itu tidak bisa bergabung. Konsekuensinya RSBI menciptakan pendidikan bias kelas sosial atau dengan bahasa lain disebut sebagai bentuk *kastanisasi* pendidikan. *Kedua*, sekolah yang terpilih sebagai RSBI mendapat subsidi lebih dibandingkan dengan sekolah yang tidak berstatus RSBI, kondisi ini menimbulkan kastanisasi dalam pendidikan sebab sekolah yang berlabel RSBI akan mendapat jatah lebih besar dibandingkan sekolah dengan status Sekolah Standar Nasional (SSN). *Ketiga*, ambiguitas refrensi sistem pendidikan dalam RSBI, realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa banyak merujuk pada konsep pendidikan dan kurikulum Cambridge,

Inggris. Pemerintah Indonesia secara terbuka tertarik untuk memberi lisensi sistem tersebut. Beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Yogyakarta mengadopsi sistem luar negeri tersebut sehingga menyebabkan peserta didik menggunakan tiga kurikulum sekaligus yaitu *General Certificate of Secondary Education (IGCSE)*, Cambridge, dan Kurikulum Nasional. *Keempat*, ideologi dan budaya yang melatarbelakangi gagasan RSBI serta praksis pembelajaran

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode sejarah yaitu suatu proses mengumpulkan, menguji, dan menganalisis peninggalan masa lampau (Gottschalk 1983, 32). Metode sejarah terdiri dari empat langkah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan rekonstruksi. Pustaka-pustaka yang digunakan berupa artikel pada jurnal, buku-buku, dan surat kabar yang disusun dengan menggunakan dan atau membahas pendidikan di Indonesia dan pendidikan bertaraf Internasional. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam terhadap pengamat pendidikan, orang tua murid, dan mantan murid untuk mengetahui pelaksanaan dan dampak dihapusnya RSBI di Kota Semarang terhadap stakeholder pendidikan. Dalam konteks ini, penulisan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen sejarah, tetapi guna memahami akan pentingnya pendidikan.

Selain berbagai permasalahan tersebut, kritik terhadap RSBI juga mengemuka karena program ini dianggap bertentangan dengan prinsip konstitusional mengenai akses pendidikan yang adil dan setara. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan tahun 2013 menilai bahwa RSBI telah menciptakan segregasi sosial melalui praktik seleksi, pembiayaan, dan adopsi kurikulum asing yang tidak sesuai dengan karakter pendidikan nasional. RSBI dipandang lebih mengutamakan “branding internasional” dibanding pemerataan mutu pendidikan bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, RSBI tidak hanya menimbulkan ketimpangan individu akan tetapi juga mengukuhkan hierarki antar satuan pendidikan sehingga bertentangan dengan amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara setara dan non-diskriminatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi RSBI di Kota Semarang

Dunia pendidikan berkembang semakin meningkat dengan pesat, hal ini dibuktikan dengan adanya sekolah-sekolah baru yang muncul serta menawarkan berbagai program yang dimiliki. Sebagaimana tertuang pada UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, “Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya”. Hal ini menunjukkan pendidikan menjadi komponen paling penting bagi bangsa Indonesia guna mencapai tujuan pendidikan nasional dan memberi hak kepada seluruh warga negara Indonesia dan membentuk karakter peserta didik sesuai cita-cita bangsa bagi dunia pendidikan. Salah satu upaya dalam mewujudkan tujuan pendidikan yaitu melakukan pengembangan kurikulum sesuai perkembangan zaman yang semakin maju. Kurikulum menjadi inti pendidikan harus mengalami perkembangan supaya mampu beradaptasi dengan arus globalisasi untuk mewujudkan pendidikan nasional sebagai dasar dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum Cambridge salah satu kurikulum bertaraf internasional yang diadopsi dan diintegrasikan dengan kurikulum nasional oleh beberapa sekolah yang ada di Indonesia salah satunya SD Hj. Isriati Baiturahman 1 Semarang. Kurikulum Cambridge mendukung perkembangan peserta didik bahkan guru dengan lima kemampuan yakni kepercayaan diri, bertanggung jawab, reflektif, inovatif, dan terlibat dalam perjalanan. Kegiatan belajar mengajar suatu pembelajaran adalah proses yang melibatkan interaksi antara pengajar serta peserta didik. Proses pembelajaran terdiri dari *adaptasi* yaitu penyesuaian kompetensi tertera pada Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) yang mengacu pada kurikulum salah satu negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) atau dengan negara maju lain yang mempunyai keunggulan dalam bidang pendidikan dan *adopsi*, merupakan penambahan kompetensi yang belum tertuang dalam SKL.

Suatu lembaga pendidikan pasti membutuhkan administrasi, hal ini yang baik harus diawali dengan sebuah perencanaan. Disimpulkan bahwa perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan pekerjaan yang sulit dipecahkan sebab harus mempunyai kesiapan serta kemantapan pada saat memulai suatu pekerjaan guna menjadikan lembaga pendidikan menjadi lebih baik. Direktorat Tenaga Kependidikan Kementerian Pembelajaran Nasional menerangkan manajemen fasilitas serta prasarana diharapkan bisa menolong sekolah dalam merancang kebutuhan sarana, mengelola pengadaan sarana, mengelola memelihara sarana, mengelola memelihara sarana, mengelola aktivitas inventaris fasilitas serta prasarana, dan mengelola kegiatan penghapusan benda investaris sekolah. Hal ini merupakan komponen penting dalam

pembelajaran serta jadi satu dari 8 Standar Nasional Pendidikan. Pentingnya fasilitas prasarana pembelajaran demi meningkatkan mutu proses pendidikan sehingga setiap institusi berlomba-lomba untuk memenuhi standar fasilitas dan prasarana pembelajaran. Terdapat pengelolaan fasilitas kepala sekolah mampu merancang dan mendata apa saja yang diperlukan oleh sekolah tersebut, apabila seluruh langkah pengelolaan sudah berjalan dengan baik serta tujuan bisa tercapai secara efisien dan efektif baik Pemerintah, Kepala Sekolah, Guru, dan warga bisa selalu tingkatkan mutu pembelajaran tersebut. RSBI memiliki standar fasilitas serta prasana minimum meliputi perabot, perlengkapan pembelajaran, media pembelajaran, novel serta sumber belajar yang lain serta prasarana terdiri dari ruang kelas, ruang pimpinan satuan pembelajan, ruang pendidik, ruang Tata Usaha (TU), ruang bibliotek, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit penciptaan, instalasi energi serta jasa, tempat olahraga, tempat beribadah, tempat bermain, lapangan atau ruang untuk olahraga, kantin, dan ruang atau tempat yang dibutuhkan pada proses belajar mengajar yang tertib dan berkepanjangan.

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) sangat penting untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan budaya saing global, selain itu dirancang untuk memberikan pendidikan mengacu pada standar internasional sehingga peningkatan dalam berbagai aspek sangat dibutuhkan. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah perlu mengalokasikan sejumlah anggaran untuk membantu sekolah baik negeri maupun swasta guna mendukung upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, salah satu program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah pemberian subsidi fasilitas RSBI. Berikut langkah guna meningkatkan fasilitas dan kualitas pengajaran di RSBI. Peningkatan Kompetensi Guru dengan cara pelatihan serta workshop untuk guru supaya mampu mengajar dengan metodologi internasional yang lebih inovatif, meningkatkan kemampuan bahasa asing guru terutama Bahasa Inggris agar dapat mengajar sesuai dengan standar internasional, dan mengadakan pertukaran pelajaran atau kolaborasi dengan guru dari sekolah internasional untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman. Pelatihan guru secara intensif dan pengadaan infrastruktur yang memadai harus menjadi prioritas sebelum menerapkan program bertaraf internasional. Upaya pengembangan SDM manusia tidak terlepas dari proses penyelenggaraan pendidikan. Keberhasilan pendidikan akan tercapai apabila didukung oleh kurikulum yang bermutu, materi pendidikan yang berbobot, dan berdaya guna dalam

kehidupan, sumber belajar yang lengkap dan memadai, tenaga pendidikan yang profesional, penentu kebijakan yang kompeten, lingkungan masyarakat yang turut berperan, dan tersedianya sarana prasarana yang memadai.

Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Indonesia, turut serta dalam program RSBI yang dicanangkan oleh Pemerintah. Implementasi dilaksanakan dimulai sejak Pemerintah Pusat menetapkan beberapa sekolah negeri sebagai calon satuan pendidikan bertaraf Internasional pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Pemerintah Kota Semarang merespon kebijakan ini dengan melakukan seleksi sekolah-sekolah yang telah memiliki rekam jejak terakreditasi A, prestasi akademik stabil, dan sarana prasarana yang relatif lengkap. Tercatat di kota ini terdapat beberapa sekolah yang menjadi RSBI antara lain SD Negeri Sendangmulyo 04, SMP Negeri 2 Semarang, SMP Negeri 5 Semarang, SMP Negeri 21 Semarang, SMA Negeri 1 Semarang, SMA Negeri 2 Semarang, dan SMA Negeri 3 Semarang. Selain itu, sekolah RSBI di Kota Semarang mengadopsi pendekatan yang mengacu pada standar internasional seperti penggunaan kurikulum internasional, jadi selain kurikulum nasional beberapa mata pelajaran diajarkan menggunakan standar internasional seperti Cambridge atau IB, Bahasa Inggris sebagai pengantar saat pembelajaran Matematika dan Sains, pengembangan teknologi di sekolah RSBI pada Kota Semarang memanfaatkan teknologi seperti laboratorium komputer, internet, dan perangkat pembelajaran modern, serta ekstrakurikuler unggulan, lebih beragam, mendukung pengembangan bakat siswa di bidang seni, olahraga, dan Sains. Implementasi RSBI di Kota Semarang memberikan peluang peningkatan kualitas pendidikan pada sekolah tertentu. Namun, hambatan berupa diskriminasi ekonomi, ketimpangan fasilitas, dan akses terbatas menunjukkan bahwa program ini belum mampu memenuhi prinsip pemerataan pendidikan. Mengamalkan sekolah dengan sertifikasi Internasional adalah berat apalagi mempertahankannya, yang bisa dilakukan adalah memperbaiki sistem yang ada sebaik mungkin, mencoba mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi kemudian mencari pemecahan. Relevan dengan persoalan yang ada di sekolah pada Kota Semarang di mana perubahan menjadi RSBI atau mendapat pengakuan secara Internasional mengalami banyak tantangan. Baik itu kendala ekonomi, psikologi, budaya kerja, rekrutmen atau seleksi penerimaan peserta didik, akademik, penetapan biaya, dan tata kelola dalam RSBI.

2. Kontroversi Kesetaraan Akses Pendidikan

Menyekolahkan anak di sekolah yang berkualitas tentunya impian semua orang tua. Pada era globalisasi pendidikan dihadapkan dengan banyak tantangan, kemajuan teknologi menyita energi untuk selalu bisa menyesuaikan dengan kemajuan bangsa. Respon dunia pendidikan terhadap era globalisasi telah mendorong munculnya varian-varian sekolah yang hanya menawarkan suatu sistem pendidikan berbasis teknologi informasi. Salah satu faktor yang menunjukkan sikap adaptif pendidikan terhadap globalisasi adalah digunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di sekolah seperti Semesta Bourding House Semarang dan SMP Karangturi Semarang. Pengamat pendidikan Darmaningtyas menilai fenomena maraknya pembukaan program kelas internasional di berbagai sekolah disebabkan oleh cara pandang keliru dalam memahami konsep pendidikan “Pendidikan itu tidak hanya dilihat secara mikro, yakni kurikulum dan metode mengajar, tetapi lebih dari itu adalah persoalan yang bersifat makro, seperti dimensi ekonomi, sosial, dan budaya”, selain itu masih banyak orang miskin putus sekolah karena tidak mampu membiayai pendidikan “seharusnya kita berfikir, solusi apa yang tepat bagi mereka, bukan berlomba-lomba membuat kelas bertaraf internasional yang indikator tidak jelas”. Oleh karena itu program sekolah bertaraf internasional hanya mengejar logika komunikasi tanpa memperhatikan logika berpikir dan justru membahayakan. Hal ini dikarenakan legitimasi hukum dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Seiring berjalannya waktu bermunculan berita menyatakan program RSBI memberi kesan diskriminatif. Dilema mahal nya biaya pendidikan program RSBI seolah-olah membatasi ruang gerak kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam mengakses layanan pendidikan bertaraf internasional. Berbicara mengenai perbedaan kualitas antara sekolah RSBI dan non-RSBI munculnya gap yang tajam antara sekolah RSBI dan non RSBI dalam hal kualitas pengajaran dan fasilitas. RSBI menciptakan dualisme dalam pendidikan, di mana sekolah berstandar internasional memiliki fasilitas yang unggul dan pengajaran berkualitas, sementara sekolah reguler tertinggal. Hal ini memperkuat ketimpangan pendidikan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Kualitas sekolah RSBI sangatlah menunjang, memiliki fasilitas modern yaitu dilengkapi dengan teknologi canggih seperti laboratorium SAINS, akses internet, dan multimedia untuk mendukung kegiatan pembelajaran interaktif. Selain itu, anggaran lebih banyak dialokasikan pada RSBI. Dilihat dari segi kurikulum sekolah RSBI menggunakan

kurikulum nasional yang dikombinasikan dengan kurikulum internasional seperti Cambridge atau International Baccalaureate, mengutamakan metode pembelajaran berbasis kompetensi dengan pendekatan kritis, kolaboratif, dan kreatif, dan fokus pada penguasaan bahasa asing khususnya Bahasa Inggris sebagai pengantar untuk mata pelajaran tertentu seperti Matematika dan Sains. Sedangkan sekolah non RSBI menggunakan kurikulum nasional secara penuh tanpa penyesuaian standar internasional, pendekatan pembelajaran lebih tradisional cenderung berbasis hafalan, serta penggunaan bahasa asing biasanya terbatas pada pelajaran Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran bukan bahasa pengantar. Di sekolah non RSBI dari segi infrastruktur fasilitas cenderung lebih sederhana yaitu laboratorium dan perpustakaan yang seringkali kurang memadai dan teknologi pembelajaran seperti proyektor, komputer jarang tersedia terutama di sekolah-sekolah di daerah terpencil. Kualitas Guru pada sekolah RSBI biasanya mendapat pelatihan tambahan baik di dalam maupun luar negeri guna menguasai metode pengajaran berbasis internasional, memiliki standar kualifikasi yang tinggi seperti kemampuan berbahasa Inggris yang baik, sedangkan sekolah non RSBI pelatihan untuk guru terbatas pada program lokal tanpa penekanan khusus pada metode internasional, dan penguasaan Bahasa Inggris serta teknologi oleh guru biasanya kurang dibandingkan dengan guru RSBI. Dilihat dari sisi sosial dan budaya yang terjadi pasca keputusan MK, sangat terlihat ketika masyarakat menilai wali murid yang dapat menyekolahkan di RSBI hanya orang-orang mampu. Begitu pula muncul pandangan dari orang tua yang mampu menyekolahkan anaknya di RSBI menganggap hal ini suatu kebanggaan tersendiri karena mempunyai anak yang bisa sekolah di institusi bertaraf internasional. Hal ini dapat diamati melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa rata-rata memiliki penghasilan yang cukup mapan dan mumpuni dibandingkan oleh masyarakat umum. Siswa siswi yang bersekolah di sekolah eks RSBI menjelaskan bahwa sudah mengetahui apabila sekolahnya sudah berganti dari Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) menjadi sekolah negeri biasa. Bapak Ibu Guru juga memberikan pengertian bahwa sekolahnya sudah berganti nama, untungnya siswa tidak terlalu terpengaruh akan status yang disandang oleh sekolahnya justru siswa lebih nyaman karena menurutnya kegiatan dan jadwalnya tidak terlalu padat. Oleh karena itu, siswa lebih leluasa dalam berinteraksi dengan siswa yang lain sehingga jiwa sosial dan rasa empati akan tumbuh serta berkembang dengan baik. Masyarakat menginginkan standarisasi RSBI yang sesuai

dengan standar internasional baik dalam materi dan kurikulum yang digunakan serta disampaikan dan fasilitas yang digunakan. Masyarakat juga berharap adanya keefektifan, baik secara finansial seperti pengalokasian dana sumbangan yang tepat dan efektif sesuai kebutuhan siswa maupun pengajar dalam kegiatan belajar mengajar, sedangkan keefektifan secara nonfinancial yaitu pemanfaatan waktu belajar, mengajar, dan materi yang diajarkan.

3. Pembatalan RSBI dan Implikasinya

Pada kenyataannya banyak tantangan yang dihadapi oleh RSBI di Kota Semarang sebab animo masyarakat yang ingin sekolah di RSBI begitu besar. Adanya isu yang mengatakan RSBI adalah sekolah eksklusif yang hanya menerima siswa siswi yang memiliki latar belakang berduit. Padahal kalangan sekolah berlabel RSBI di Kota Semarang sudah bersepakat untuk memfasilitasi siswa tidak mampu dalam Penerimaan Peserta Didik (PPD). Asal semua itu didukung dengan adanya kualitas dan potensi akademik yang baik dan lolos proses seleksi PPD. Apalagi dalam Peraturan Walikota terkait PPD Kota Semarang 2011, juga mengatur adanya kewajiban menampung siswa siswi tidak mampu minimal 20 persen dari kuota siswa baru yang dimilikinya. Keberadaan RSBI menuai pro dan kontra, pihak yang setuju dengan keberadaan sekolah berstatus internasional berpendapat bahwa pendidikan harus memiliki standarisasi supaya dapat diukur dan diketahui kemampuan pendidikan itu sendiri. Penggolongan kasta dalam sekolah RSBI merupakan bentuk diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi, hanya siswa dari keluarga kaya atau mampu yang mendapatkan kesempatan sedangkan siswa dari keluarga sederhana atau tidak mampu hanya memiliki kesempatan di sekolah umum. Selain itu, penekanan Bahasa Inggris bagi siswa di sekolah RSBI dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Sumpah Pemuda tahun 1928 yang dalam salah satu ikrarnya menyatakan berbahasa satu yaitu Bahasa Indonesia. Sebab itu, seluruh sekolah di Indonesia seharusnya menggunakan bahasa pengantar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, tidak selayaknya ada sekolah yang berstatus RSSN, SSN, RSBI, dan SBI sebab untuk memperoleh pendidikan merupakan hak semua warga negara. Maka dari itu, keberadaannya harus segera dihilangkan karena asas manfaatnya lebih sedikit dibanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan. Tragedi pro dan kontra dalam implementasi RSBI di Indonesia khususnya Kota Semarang akhirnya menemui titik akhirnya. Hal ini

berkaitan dengan putusan dari MK mengabulkan gugatan permohonan yang diajukan oleh kalangan aktivis pendidikan terhadap *judicial review* Pasal 50 Ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa putusan MK mengenai Sisdiknas adalah *inkonstitusional* artinya mengisyaratkan pembubaran terhadap RSBI. Kebijakan MK dalam menghapus RSBI atas dasar bertentangan dengan UUD 1945, menimbulkan dualisme dalam dunia pendidikan adanya perbedaan strata antara sekolah reguler biasa dengan sekolah bertaraf internasional serta perhatian yang lebih dibandingkan sekolah biasa itulah alasan MK menghapus RSBI.

Selain hal ini, RSBI juga membawa dampak negatif antara lain pelaksanaan RSBI di Kota Semarang menggunakan Bilingual yang mana setiap guru mata pelajaran dituntut mampu berbahasa Inggris dengan lancar dan mampu menjelaskan secara jelas maupun detail mengenai bahan ajar, tetapi dalam kenyataannya guru mata pelajaran tidak menguasai dengan baik bahasa Internasional sehingga terjadi kerancauan dalam memberikan bahan ajar dan kebingungan siswa, kedua terjadinya diskriminasi sikap oleh para guru terhadap siswa kelas reguler dengan kelas internasional, ketiga kesalahpahaman masyarakat mengenai RSBI karena tidak ada sosialisasi dari pihak Pemerintah mengenai sistem ini sehingga sering terjadi masyarakat terpengaruh *efek prestice* karena tidak memahami betul bagaimana konsep dasar dan pelaksanaannya, keempat adanya perbedaan perlakuan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait kepada anak dengan kelas reguler maupun RSBI, kelima pengadaan fasilitas-fasilitas mewah pada pendidikan RSBI yang berujung penggunaan *advance tecnology* cenderung menimbulkan sifat malas dan pasif pada siswa yang mengakibatkan mematikan kemampuan pada siswa, serta keenam title "*taraf internasional*" memberikan image tersendiri bagi masyarakat untuk apa dan siapa RSBI sebab masih menjadi polemik karena siswa RSBI di dominasi oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas, selain itu siswa RSBI hanya diperuntukkan untuk siswa di atas rata-rata Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Penghapusan RSBI memberikan ruang dan kebebasan kepala sekolah untuk mengembangkan dan mengelola sekolah secara mandiri tanpa ada tuntutan maupun tekanan dari pihak luar. Pengelolaan dan pengembangan sekolah diatur oleh pihak sekolah sendiri secara utuh, termasuk program-program yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Hal ini dapat terbukti melalui adanya kajian di setiap hari Jumat serta mengenakan seragam muslimah bagi guru perempuan. Tentunya dihapusnya RSBI pada 8 Januari 2013

membawa dampak signifikan terhadap pembelajaran yang ada di sekolah berlabel internasional. Kebijakan pendidikan bertaraf internasional memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing global. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan guna menyesuaikan kebijakan tersebut dengan konteks lokal, memperluas akses bagi seluruh lapisan masyarakat, dan memastikan keseimbangan antara globalisasi serta pelestarian budaya lokal. Melalui refleksi mendalam, kebijakan ini dapat menjadi landasan bagi pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

RSBI dibentuk bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan melalui adopsi kurikulum dengan standar internasional, seperti penggunaan Bahasa Inggris sebagai pengantar dan kurikulum berbasis internasional. Program ini membuka peluang bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi. Meskipun, RSBI membawa inovasi keberadaannya sering dikritik karena memperbesar kesenjangan sosial. Biaya yang relatif tinggi guna masuk dan fasilitas eksklusif membuat akses ke RSBI cenderung terbatas pada siswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, sehingga siswa dari keluarga kurang mampu sulit untuk menikmati manfaatnya. RSBI sebagai inovasi pendidikan sebenarnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas SDM di Kota Semarang, namun jika tidak disertai dengan kebijakan yang inklusif program ini akan memperbesar kesenjangan sosial. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap anak tanpa memandang latar belakang ekonomi memiliki akses yang sama terhadap pendidikan bermutu.

Kebijakan RSBI dianggap gagal memenuhi prinsip inklusivitas, sebab dalam pendidikan berarti menyediakan akses setara bagi semua anak tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, dan geografis. Pelaksanaan RSBI justru memperlihatkan beberapa hambatan besar terhadap inklusivitas biaya pendidikan yang tinggi sebab RSBI memungut biaya tambahan untuk mendukung program berstandar internasional, sehingga hanya siswa dari keluarga mampu dapat mengaksesnya dan seleksi yang diskriminatif mengutamakan kemampuan akademik dan Bahasa Inggris cenderung meminggirkan siswa dari keluarga dengan akses pendidikan terbatas, dan RSBI lebih banyak didirikan di kota-kota besar lalu meninggalkan daerah terpencil dengan pendidikan kurang

berkualitas. Prinsip keadilan sosial menekankan pada distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil dalam pendidikan. Kebijakan RSBI gagal mewujudkan hal ini karena kesenjangan anggaran sebab sekolah RSBI menerima lebih banyak alokasi dana dibandingkan sekolah reguler, menyebabkan ketimpangan fasilitas semakin tajam, peluang yang tidak setara anak-anak dari keluarga miskin memiliki hambatan besar untuk masuk RSBI baik karena biaya maupun akses geografi, dan fokus terpusat pada sekolah tertentu lebih mementingkan peningkatan mutu di beberapa sekolah “unggulan”, sementara mayoritas sekolah lain dibiarkan dengan kualitas yang stagnan.

Program RSBI telah gagal memenuhi prinsip inklusivitas dan keadilan sosial karena lebih mementingkan mutu pendidikan bagi sebagian kecil siswa daripada pemerataan akses untuk seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas harus menjadi hak semua siswa, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau geografis. Meski program internasionalisasi melalui RSBI dibubarkan oleh Pemerintah atas perintah Mahkamah Konstitusi, tapi program pendidikan kelas internasional masih terus diselenggarakan oleh berbagai lembaga pendidikan dasar dan menengah, meskipun jumlahnya tidak sebanyak dan semassif ketika RSBI diselenggarakan. Perkembangan pendidikan harus diselaraskan dengan kecenderungan kekinian, karena pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar dan terencana untuk mengantarkan peserta didik agar bisa menjawab semua kebutuhan yang diperlukan pada masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan di Indonesia perlu dirancang ulang agar lebih inklusif dan adil. Pasca penghapusan RSBI, Kota Semarang telah mengadopsi kebijakan seperti sekolah zonasi, sekolah model, dan Kurikulum Merdeka untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata. Meskipun ada kemajuan tetapi pemerataan fasilitas dan mutu pengajaran masih menjadi tantangan utama yang harus terus diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 5/PUU-X/2012* tentang Pengujian UU No.20 Tahun 2003 Pasal 50 Ayat 3.

Teguh Triwiyanto, *Panduan Mengelola Sekolah Bertaraf Internasional*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2010, hal. 59.

- Musthofa Rembangi, *Pendidikan Transformatif: Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan Di Tengah Pusaran Arus Globalisasi*, Yogyakarta: Teras 2010, hal. 152.
- Aulia Reza Bastian, *Reformasi Pendidikan*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama 2022, hlm. 63-65.
- Baharuddin, *Pendidikan Humanistik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi Praktis Dalam Dunia Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2007, hlm. 79-89.
- Nazaruddin, *Manajemen Pembelajaran: Implementasi Konsep, Karakteristik, Dan Metodologi Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Umum*, Yogyakarta: Teras 2007, hlm 25-40.
- H.A.R Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 75.
- Suyanto, “Dinamika Pendidikan Nasional dalam Percaturan Dunia Global”. Jakarta; PSAP Muhammadiyah 2006.
- Suyatno, “Evaluasi Implementasi RSBI Pada Mata Pelajaran Sains Dan Matematika” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* Vol.17, Nomor 4, 2011.
- Syahrizal, “Problem Implementasi Putusan MK, Jurnal Konstitusi”, Volume 4, Nomor 1, Maret 2007.
- Widjanarko, “Implementasi Kurikulum Cambridge dalam Pembelajaran Matematika”, *Jurnal PGSD* Volume 6 Nomor 6.
- Widyastono, “Pengembangan Kurikulum Sekolah Bertaraf Internasional”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 15 (3): 265-274.
- Kompas, *Kelas Bertaraf Internasional Sebatas Mengejar Ambisi*, 1 Juni 2004
- Kompas, *MK Batalkan Status RSBI*, 8 Januari 2013.